

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara-negara yang berkomitmen untuk kemajuan terlibat dalam pembangunan. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang sangat kritis terhadap isu negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, pariwisata adalah salah satu sektor tersebut. Menurut Spillane, kontribusi pariwisata terhadap pembangunan negara dapat dijelaskan dalam tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi (sebagai sumber pendapatan devisa dan pajak), aspek sosial (sebagai pencipta lapangan kerja), dan aspek kebudayaan (sebagai sarana memperkenalkan budaya lokal kepada wisatawan asing) (Spillane, 1987).

Jumlah pemerintahan Kabupaten/Kota yang semakin banyak di Indonesia menjadi perhatian utama bagi pemerintah pusat, DPR/DPRD, dan masyarakat. Masalah utama adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan aktivitas di wilayahnya, terutama untuk pemerintahan daerah yang baru. Pelaksanaan aktivitas tersebut sangat terkait dengan masalah pendapatan dan belanja daerah. Dengan kata lain, bagaimana cara pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan pendapatan daerah, dan mengalokasikannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar*

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Dengan menggunakan pasal tersebut, pemerintah daerah dapat menerapkan otonomi dengan wewenang yang jelas, luas, dan bertanggung jawab. Konsep otonomi daerah mengacu pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri dengan prakarsa mereka sendiri, yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dan dipatuhi oleh undang-undang yang berlaku.

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam regulasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal administrasi pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut dikenal sebagai sistem otonomi daerah dengan prinsip-prinsip dan sistem desentralisasi (Qodarrochman, 2010).

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur sumber daya yang dimilikinya agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pemerintah daerah berupaya meningkatkan perekonomian daerahnya masing-masing, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan manajemen sumber-sumber PAD yang telah ada. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber PAD

yang dimilikinya. Semakin banyak sumber-sumber PAD yang dimiliki, maka wilayah tersebut akan semakin banyak memiliki sumber pendapatan untuk pembangunan daerahnya.

Pada dasarnya, pembangunan adalah proses yang memiliki banyak dimensi, termasuk perubahan dalam struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan institusi nasional. Pembangunan juga melibatkan perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan penghapusan kemiskinan (Yuliadi, 2013).

Pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata yang memiliki peran penting sebagai pendorong kemajuan sektor lainnya secara teratur. Keberhasilan dalam mengembangkan sektor pariwisata akan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah karena pariwisata merupakan salah satu elemen yang berperan dalam peningkatannya (Saleh, 2003).

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka wilayah tersebut akan semakin mandiri, yang ditandai dengan penurunan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Namun, kenyataannya, sebagian besar wilayah masih bergantung pada subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat karena PAD mereka terbatas. Untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya, salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah (Halim, 2004).

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah adalah dengan memanfaatkan potensi pariwisata. Keterkaitan antara pendapatan daerah dan industri pariwisata berjalan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagi hasil pajak atau bukan pajak. Menurut Tambunan yang dikutip oleh Badrudin

(2001), industri pariwisata dapat menjadi sumber PAD melalui pengembangan industri pariwisata kepunyaan masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD, pemerintah daerah dapat memperoleh pajak dan retribusi resmi dari aktivitas industri pariwisata yang mencakup sektor-sektor seperti hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *professional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan, serta transportasi. Industri pariwisata memiliki ciri-ciri multisektoral sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pada dasarnya, upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia didasarkan pada berbagai faktor, seperti menurunnya peran sektor migas sebagai penghasil devisa, sehingga pariwisata sebagai industri jasa menjadi salah satu potensi yang prospektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di masa depan dan meningkatkan pemasukan pajak negara. Industri pariwisata dianggap cukup layak untuk memajukan ekonomi dan menjadi prioritas yang relatif tinggi untuk meningkatkan pendapatan negara. Terdapat berbagai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata, seperti biro perjalanan, transportasi, perhotelan, restoran, seni dan budaya daerah, kerajinan rakyat, guider, pameran, dan acara olahraga internasional yang diselenggarakan di berbagai wilayah, serta berbagai kegiatan lainnya. Oleh karena itu, industri pariwisata dapat mendorong industri lainnya dan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan (Badrudin, 2001).

Industri pariwisata merupakan jenis industri baru yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi, seperti memberikan

lapangan pekerjaan, meningkatkan standar hidup, dan mendukung industri-industri produktif lainnya. Pariwisata sebagai sektor yang beragam, mencakup tidak hanya industri modern, tetapi juga industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata. Secara ekonomis, industri penginapan dan transportasi juga dianggap sebagai bagian dari industri pariwisata (Saleh, 2003).

Secara umum, peran pariwisata mencakup tiga aspek yaitu ekonomi (sebagai sumber devisa dan penghasil pajak), sosial (sebagai pencipta lapangan kerja), dan kebudayaan (sebagai promotor kebudayaan untuk para wisatawan asing) (Spillane J. J., 1987). Apabila sektor pariwisata dibangun secara terencana dan terintegrasi dalam perekonomian suatu negara, maka perannya dapat melampaui sektor migas dan industri lainnya.

Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja secara merata, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata di Indonesia, serta menjaga potensi pariwisata alam Indonesia. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar bangsa.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata berarti akan meningkatkan peranannya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini karena pariwisata menjadi faktor utama dalam pengembangan sektor tersebut, yang dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti jumlah objek wisata yang tersedia, jumlah wisatawan

yang datang baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tingkat hunian hotel, dan faktor lainnya.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1950. Provinsi ini terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan ibu kota di Bandung. Berikut ini merupakan daftar kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.1
Daftar 27 Kabupaten/Kota, Pusat Pemerintahan, Kecamatan dan
Kelurahan/Desa di Provinsi Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Bandung	Soreang	31	10/270
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	16	-/165
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	23	7/180
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	40	17/417
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	26	7/258
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	32	6/354
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	40	12/412
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	42	21/421
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	31	8/309
10	Kabupaten Karawang	Karawang	30	12/297
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	32	15/361
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	26	13/330
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	10	-/93
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	17	9/183
15	Kabupaten Subang	Subang	30	8/245
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhan Ratu	47	5/381
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	26	7/276
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	39	-/351
19	Kota Bandung	-	30	151/-
20	Kota Banjar	-	4	9/16
21	Kota Bekasi	-	12	56/-
22	Kota Bogor	-	6	68/-
23	Kota Cimahi	-	3	15/-
24	Kota Cirebon	-	5	22/-
25	Kota Depok	-	17	63/-

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan	Kecamatan	Kelurahan/Desa
26	Kota Sukabumi	-	11	33/-
27	Kota Tasikmalaya	-	10	69/-

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI

Potensi pariwisata di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat cukup menjanjikan dan dapat berkontribusi pada pendapatan daerah masing-masing. Potensi wisata di Provinsi Jawa Barat sangat luas dan beragam yaitu dari jenis wisata yang ada seperti pantai, gunung, kawah dan lain lain serta ada juga wisata taman safari, wisata budaya seperti gedung sate dan monument sejarah yang ada di Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat peraturan daerah no. 15 tahun 2015 yaitu rancangan pembangunan kepariwisataan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia. Sektor pariwisata dijadikan sebagai gerakan prioritas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setara dengan tujuan rencana pemerintah yaitu pengembangan destinasi yang siap dikunjungi dan destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Akan tetapi, sejak tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 (Yuliana, 2020).

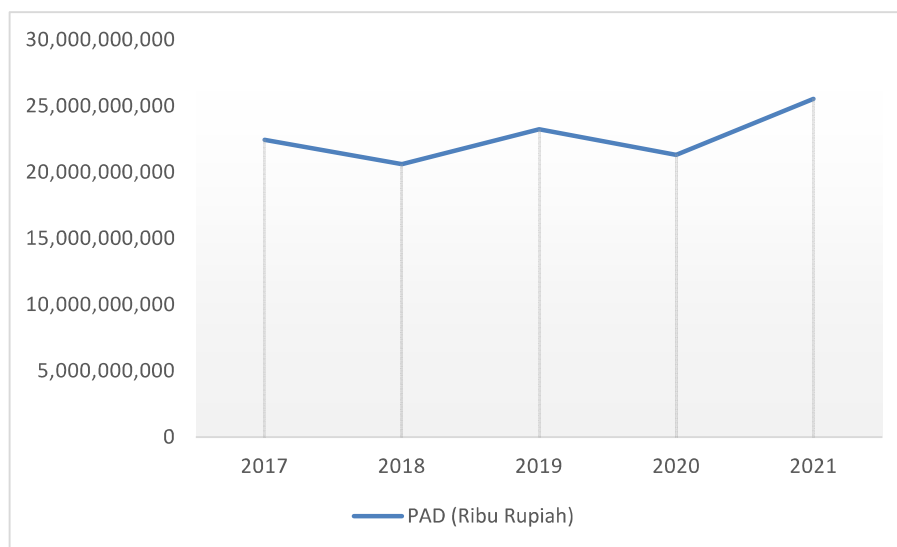
Covid-19 adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia, ekonomi dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi

ekonomi global termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk paruh pertama tahun ini dan mungkin lebih lama jika tindakan penahanan wabah Covid-19 tidak efektif. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor- sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya (Sugihamretha, 2020).

Pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah dan terhentinya aktivitas pariwisata di Indonesia akibat penyebaran Covid-19 ini berdampak pada penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (Paludi, 2022).

Dalam kurun waktu yang belum lama ini Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) merilis situasi dan dampak virus corona akan membuat penurunan penerimaan pariwisata internasional dengan perkiraan sekitar 20 hingga 30 persen.

Berdasarkan data UNWTO, hal ini artinya berdampak pada nilai pertumbuhan yang akan hilang selama lima hingga tujuh tahun karena wabah Covid-19 ini (Aditya, 2020).



Gambar 1.1

**Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota
Seluruh Jawa Barat Tahun 2017-2021**

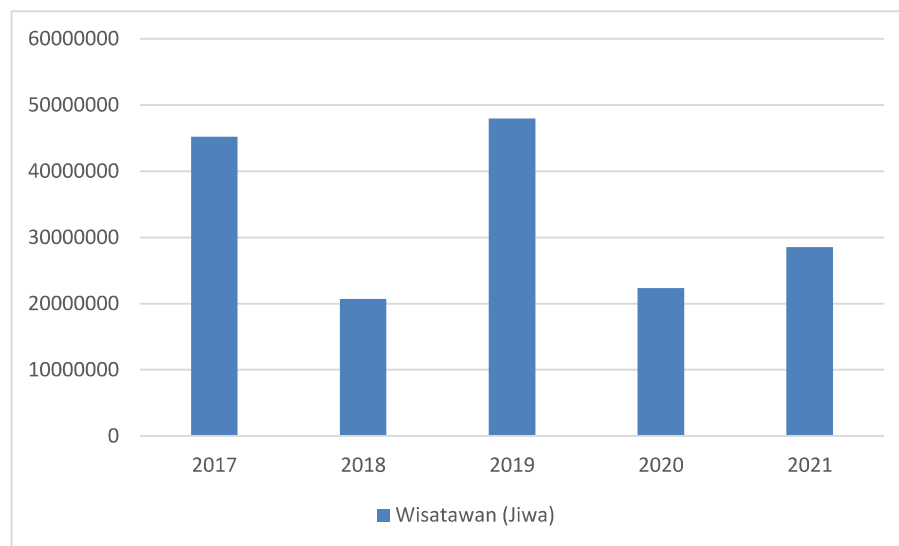
Sumber: Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (2019-2021)

Berdasarkan data pada gambar diatas, diketahui bahwasannya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan serta penurunan. Tahun 2017 menerima pendapatan sebanyak Rp22.439.986.899, kemudian tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -8,21% dan merupakan penerimaan pendapatan terendah yaitu sebesar Rp20.597.125.925. Tahun 2021 menjadi penerimaan pendapatan yang tertinggi yaitu sebesar Rp25.525.756.000, dimana terjadi perubahan sebesar 19.81% dari tahun

sebelumnya yaitu 2020. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 12.86% menjadi Rp23.246.080.540. Selanjutnya terjadi penurunan sebesar -8.35% di tahun 2020 menjadi Rp21.306.042.197.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah tentunya berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan Pendapatan Asli daerah, salah satunya adalah wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan mempengaruhi pendapatan daerah pada sektor pariwisata. Provinsi Jawa Barat memiliki banyak sekali destinasi wisata yang diminati wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, diantaranya Gunung Tangkuban Parahu ialah gunung yang masih aktif hingga saat ini, jika dilihat dari atas Gedung Sate Kota Bandung, bentuk gunung ini terlihat seperti perahu besar yang terbalik, sesuai dengan namanya Tangkuban Parahu yang berarti perahu yang terbalik. Gunung Papandayan ialah gunung api strato yang terletak di Kabupaten Garut, terdapat beberapa kawah yang terkenal oleh wisatawan diantaranya kawah mas, kawah baru, kawah manuk, dan lain-lain, selain itu di Gunung Papandayan wisatawan juga dapat melakukan aktifitas kemah dengan fasilitas yang memadai. Selain pegunungan Provinsi Jawa Barat juga memiliki Pantai yang memiliki daya tarik luar biasa, seperti Pantai Pangandaran contohnya, berada di Kabupaten Pangandaran pantai ini memiliki berbagai aktifitas wisata seperti *water sport*, snorkeling, berselancar, atau mengelilingi cagar alam dengan hamparan pasir putih yang indah. Untuk wisata kriya sendiri di Jawa Barat terdapat beberapa kota yang menghasilkan produk industri kreatif diantaranya Kota Tasikmalaya dengan produk andalannya yaitu payung geulis, sandal kelom, batik, anyaman mendong. Kabupaten Garut dengan

produk tas, sepatu, jaket dengan bahan dasar kulit dan lain sebagainya. Selain wisata yang penulis sebutkan diatas masih banyak destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan potensi yang sangat besar baik itu dalam segi kunjungan wisatawannya maupun dalam segi ekonominya.



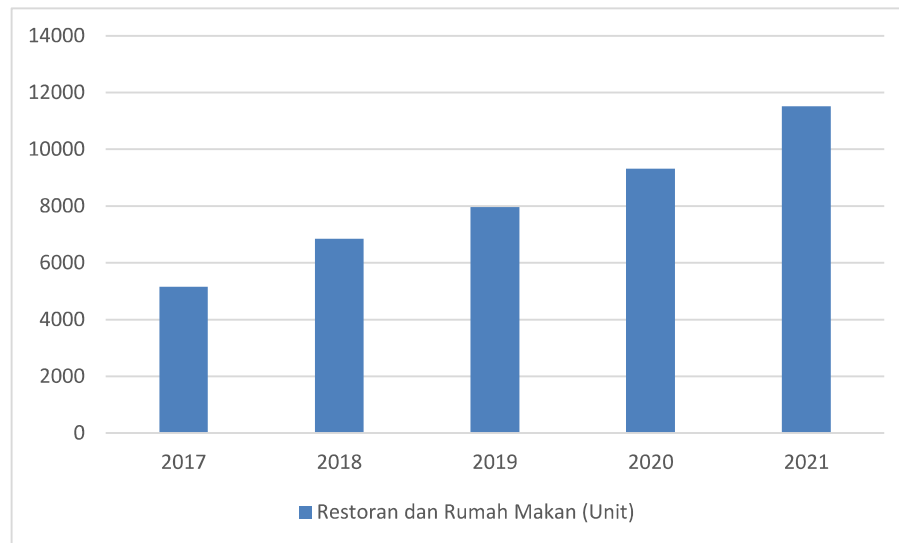
Gambar 1.2

Jumlah Wisatawan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (2022)

Pada data gambar 1.2 memperlihatkan bahwa perkembangan Jumlah Wisatawan pada tahun 2017-2021 baik wisatawan lokal maupun mancanegara ke Jawa Barat mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -54,19% dengan jumlah pengunjung 20.713.169 jiwa dari tahun 2017 yang mencapai 45.216.254 jiwa, kemudian mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 yaitu mencapai 47.986.095 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 131,67%. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan hanya mencapai 22.327.316 jiwa yang artinya mengalami penurunan sebesar -53,47%. Pada tahun

2021 Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kembali yang mencapai 28.541.076 jiwa dengan tingkat pertumbuhan mencapai 27,83%.



Gambar 1.3

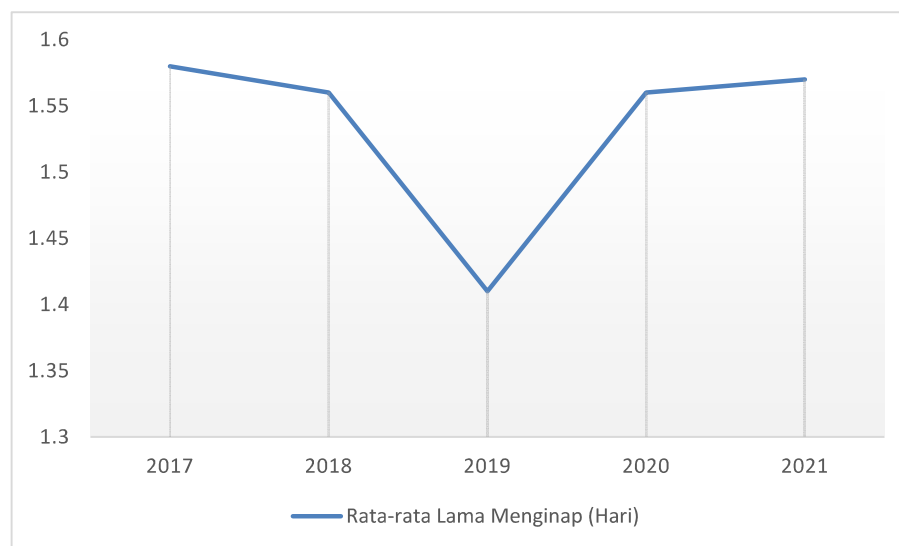
Jumlah Restoran dan Rumah Makan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber: Open Data Jabar (2022)

Restoran dan Rumah Makan adalah salah satu fasilitas penunjang pariwisata yang wajib ada pada suatu wilayah, dimana fasilitas tersebut berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di wilayah tersebut. Berdasarkan gambar 1.3 diatas bahwa perkembangan jumlah restoran dan rumah makan dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 5.154 unit, meningkat ke tahun 2018 sebanyak 6.849 unit dengan tingkat pertumbuhan sebesar 32.89%. Tahun 2019 sebanyak 7.962 unit yang berarti mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 16,25%, kemudian tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 9.315 unit dengan tingkat pertumbuhan sebesar

16,99% dan tahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebanyak 11.510 unit dengan tingkat pertumbuhan sebesar 23,56%.

Pariwisata merupakan suatu industri yang bergantung pada jumlah kedatangan para wisatawan. Dengan hal itu pengelolaan dan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) harus ditata dan dikelola dengan baik. Di era saat ini, sektor pariwisata menjadi sektor potensial dalam mendorong salah satu sumber penerimaan daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya potensial pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.



Gambar 1.4

Rata-Rata Lama Menginap Tamu Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (2022)

Rata-rata lama menginap tamu dipertimbangkan sebab dari jumlah banyaknya wisatawan menginap akan mempengaruhi seberapa besar pajak dari hotel yang dapat diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Ketika wisatawan

lebih lama menginap tentu akan semakin banyak berkunjung ke berbagai tempat dan membayar seperti retribusi parkir dan pajak restoran sehingga menjadikan suatu daerah mengalami perubahan ekonomi. Pada gambar 1.4 memperlihatkan bahwa rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan serta kenaikan. Tahun 2017 merupakan rata-rata lama menginap tertinggi yaitu sebanyak 1,58 hari dan tahun 2019 menjadi yang terendah yaitu 1,41 hari, dimana terjadi perubahan sebesar -9,62% dari tahun sebelumnya yaitu 2018 yang mencapai 1,56 hari. Pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi sebanyak 1,56 hari dengan perubahan sebesar 10,64%. Selanjutnya terjadi kenaikan lagi sebesar 0.64% di tahun 2021 yaitu sebanyak 1,57 hari rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Jawa Barat.

Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Jawa Barat tidak selamanya mengalami kenaikan dikarenakan beberapa faktor seperti kunjungan wisatawan. Setiap tahunnya ada banyak wisatawan yang berkunjung di Jawa Barat tetapi tidak di barengi dengan penambahan rata-rata lama menginap. Oleh karena itu, meningkatnya wisatawan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik oleh pemilik-pemilik hotel di Jawa Barat.

Salah satu hal utama dalam membangun sistem ekonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing adalah dengan fokus pada sektor pariwisata, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka judul penelitian yang diambil penulis adalah

"Pengaruh Pandemi Covid-19 dan Faktor Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 secara

bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait pengaruh jumlah wisatawan, jumlah restoran dan rumah makan, rata-rata lama menginap tamu, serta pandemi covid-19 terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

2. Bagi Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan motivasi untuk pemerintah daerah agar senantiasa mendorong pertumbuhan dalam menentukan arah kebijakan yang tepat mengenai pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Akademisi

Penelitian diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan pembelajaran bagi akademisi yang lainnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumber data dalam menunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 9 Kota diantaranya: Bandung, Banjar, Bekasi, Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi dan Tasikmalaya serta 18 Kabupaten yang meliputi: Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang dan Tasikmalaya.

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui website resmi dari Open Data Jabar, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2022 dengan melakukan pengajuan judul. Selanjutnya pada tahap sidang kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan dilaksanakan pada bulan Juni 2023. Adapun pelaksanaan penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif oleh penulis, dosen pembimbing dan selanjutnya setelah seminar usulan penelitian dilibatkan pula pihak dosen penguji. Adapun matriks jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Keterangan	2023																															
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept.							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■																														
2	Pengumpulan Data			■	■	■	■																										
3	Pembuatan Usulan Penelitian					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Usulan Penelitian																	■	■														
5	Revisi Usulan Penelitian																	■	■														
6	Analisis Data																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
7	Penyusunan Skripsi																													■	■		
8	Sidang Skripsi																														■	■	■
9	Revisi dan Pengesahan Skripsi																														■	■	■